

## Besok Terakhir Pendaftaran BLT UMKM, Warga Serbu Kelurahan Berburu SKU



*Radarlampung.co.id*

RADARLAMPUNG.CO.ID – Menjelang tutupnya pendaftaran BLT UMKM pada Jumat (4/9), warga ramai datangi kantor kelurahan. Mereka ngeluruk kelurahan untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai salah satu persyaratan mendaftar BLT UMKM.

Seperti terlihat di Kelurahan Telukbetung. Menurut Nursiwan selaku lurah setempat, dua hari ini terjadi lonjakan signifikan pembuatan SKU. Di mana, dalam satu hari dirinya menandatangani 20 SKU.

“Dua-tiga hari ini meningkat, sudah ada sekitar 60 masyarakat yang membuat SKU untuk pengajuan BLT UMKM,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/9).

Menurutnya, jika dibanding hari biasa, warga jarang membuat SKU. “Pembuatan SKU ini kita libatkan RT untuk memberi pengantar, supaya tidak disalahgunakan dan benar yang mengajukan memiliki usaha,” tuturnya.

Pemandangan sama terlihat di Kelurahan Pesawahan. Pun terjadi peningkatan pembuatan SKU. Diungkapkan Asdison selaku lurah setempat, dalam sehari ada sekitar 20 pengajuan SKU yang masuk ke ruangannya.

“Ya lumayan ada peningkatan. Kalau hari-hari biasa gak ada yang bikin,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Senada, Lurah Kangkung Ediyalis pun mengaku menjelang penutupan pendaftaran BLT UMKM. Warga Kelurahan Kangkung berbondong-bondong membuat SKU.

Terpantau, warga memadati Kantor Kelurahan Kangkung yang beralamat di Jalan Ikan Bawal, hingga pukul 14.00 WIB warga masih terus berdatangan mengurus SKU. (pip/sur)

### Sumber Berita:

1. <https://radarlampung.online/2020/09/03/besok-terakhir-pendaftaran-blt-umkm-warga-serbu-kelurahan-berburu-sku/>, “Besok Terakhir Pendaftaran BKT UMKM Warga Serbu Kelurahan Berburu SKU”, 3 September 2020;

2. <https://radarlampung.online/2020/09/03/jumat-pengajuan-banpres-umkm-tutup/>, “Jumat, Pengajuan Banpres UMKM Tutup”, 3 September 2020;
3. <https://republika.co.id/berita/daerah/sumatra/qg3bvm327/seribuan-umkm-di-bandarlampung-daftar-bpum>, “Seribuan UMKM di Bandar Lampung Daftar BPUM”, 3 September 2020.

### **Catatan:**

Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BLT UMKM) yang dimaksud dalam artikel di atas adalah Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang resmi diluncurkan oleh Presiden dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada tanggal 24 Agustus 2020. BPUM merupakan salah satu program terbaru dari skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimiliki oleh Kemenkop dan UKM berupa bantuan hibah atau insentif dari pemerintah, bukan pinjaman atau kredit dan tanpa biaya administrasi apapun. Bantuan ini diberikan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 sebagai tambahan modal kerja agar lebih produktif dan usahanya dapat bertahan. Usaha Mikro yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BUPM berhak didapatkan oleh WNI pemilik usaha mikro yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bukan ASN, TNI/Polri, maupun Pegawai BUMN/BUMD, serta tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dengan domisili usaha yang berbeda pun dapat menerima BUPM dengan melampirkan SKU dari kelurahan/desa tempat usahanya berada.

BPUM diberikan sebanyak satu kali berupa uang sebesar Rp2.400.000,00 per pelaku usaha mikro yang disalurkan langsung ke rekening penerima di bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah, yaitu BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri. Bagi UMKM yang belum memiliki rekening akan dibuatkan rekeningnya pada saat pencairan dana BPUM oleh bank penyalur.

BPUM akan disalurkan sampai dengan bulan September 2020 dengan target sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro dan usulan akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi. Mekanisme pemberian BPUM dimulai dari Pelaku Usaha Mikro calon penerima BUPM mengajukan/mendaftarkan diri dengan melengkapi data usulan pada Pengusul dan memenuhi berkas persyaratan tertentu, yaitu NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, dan nomor telepon. Selain persyaratan tersebut, pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung juga mewajibkan adanya SKU dan foto tempat usaha untuk menghindari adanya pembohongan.

Lembaga pengusul, diantaranya Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, Kementerian/Lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas BUMN dan BLU lalu mengidentifikasi dan mengusulkan kepada Menteri Koperasi dan UKM cq. Deputi Penanggungjawab Program BPUM. Selanjutnya data usulan tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemenkop dan UKM bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK untuk menentukan layak tidaknya mendapatkan BPUM. Setiap penerima BPUM akan diinformasikan melalui pesan singkat berupa SMS dari bank penyalur agar dapat dicairkan.

Pedoman terkait tata cara dan syarat penyaluran BPUM diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Perekonomian Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020; dan
3. FAQ Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.